

PREFERENSI PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Noer Apptika Fujilestari¹, Arlan Siddha²

^{1,2} Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani
Jl. Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi
Email: noer.apptika@lecture.unjani.ac.id

Submitted: 16-05-2025; Accepted: 12-06-2025; Published :14-06-2025

ABSTRAK

Penyebaran COVID-19 yang begitu masif terjadi memberikan dampak yang sangat luas dalam setiap sendi kehidupan sampai pada aras lokal. Penyebaran COVID-19 ini berdampak pada pelaksanaan politik lokal yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak lanjutan tahun 2020 yang dilakukan pada 270 daerah yang terdiri dari 9 daerah provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota termasuk salah satunya Kabupaten Bandung dengan diikuti oleh 3 kandidat pasangan calon kepala daerah. Studi tentang pemilihan umum menghasilkan beberapa tipe perilaku pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan preferensi pemilih dalam pilkada Kabupaten Bandung pada masa pandemic covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis yang paling mempengaruhi preferensi pemilih yang mana pemilih memilih berdasarkan sisi sosiologis seperti jenis kelamin dan agama. Sementara pendekatan psikologis pemilih memilih berdasarkan kedekatan emosional dengan kandidat dan terakhir pendekatan pilihan rasional ini pemilih memilih atas dasar kepercayaannya terhadap kandidat.

Kata kunci: Pilkada; Preferensi Pemilih; Covid-19; Kabupaten Bandung

ABSTRACT

The widespread outbreak of COVID-19 has had a profound impact on all aspects of life, including at the local level. The pandemic notably affected the conduct of local politics, particularly the simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) in 2020, which were held across 270 regions comprising 9 provinces, 224 regencies, and 37 cities, including Bandung Regency. In Bandung Regency, three candidate pairs contested the election. Studies on electoral behavior have identified several types of voter behavior. This study aims to analyze and describe voter preferences in the Bandung Regency Pilkada during the COVID-19 pandemic. The research employed a descriptive qualitative method, utilizing observation, interviews, and document analysis for data collection. The findings reveal that the sociological approach was the most influential in shaping voter preferences, with voters making choices based on sociological factors such as gender and religion. Meanwhile, the psychological approach indicated that voters based their decisions on emotional connections with the candidates. Lastly, the rational choice approach showed that voters made decisions grounded in their trust and confidence in the candidates.

Keyword: Regional Elections; Voter Preferences; Covid-19; Bandung Regency

PENDAHULUAN

Penyebaran COVID-19 yang begitu masif terjadi memberikan dampak yang sangat luas dalam setiap sendi kehidupan sampai pada aras lokal. Penyebaran COVID-19 ini berdampak pada pelaksanaan politik lokal yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak lanjutan tahun 2020 yang awalnya pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September berubah menjadi 9 Desember 2020 (Bahriyah, 2021). Pilkada serentak ini dilakukan pada 270 daerah yang terdiri dari 9 daerah provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemerintah dalam menghadapi Pilkada serentak pada masa pandemi COVID-19 telah mengeluarkan kebijakan yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Secara substansi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ini menjadi payung hukum pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan secara demokratis dan berkualitas serta pada sisi lain menjaga agar pelaksanaan Pilkada serentak juga aman dari penyebaran COVID-19 (Hasanuddin, 2021).

Pemilihan umum pada masa pandemic covid-19 diprediksi akan mengalami degradasi atau penurunan kualitas karena menurunnya angka partisipasi masyarakat, hal ini disebabkan akibat pandemi yang menimbulkan ketakutan dalam diri masyarakat untuk mengikuti setiap proses pemilu termasuk dalam menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Noviani, 2022). Pilkada Kabupaten Bandung merupakan daerah yang menjadi titik peninjauan Gubernur Jawa Barat karena memiliki indeks kerawanan tinggi dari delapan daerah di Jawa Barat yang menggelar Pilkada. Namun diantara kedelapan daerah tersebut, Kabupaten Bandung memiliki jumlah pemilih terbanyak yang terdiri dari 6.874 TPS yang tersebar di 280 desa/kelurahan, 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung (Sumianty, 2021). Namun hal tersebut tidak sesuai dengan data yang didapat dari hasil hitungan KPU Kabupaten Bandung, yang mana partisipasi politik masyarakat ada kenaikan 9% dibandingkan dengan pilkada lima tahun lalu. Partisipasi

dalam Pilkada 2020 sekitar 72.18% sementara partisipasi pada Pilkada 2015 sekitar 62.9% (Liputan6, 2020).

Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dapat dikatakan menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Oleh karenanya rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin yang kemudian akan mengarahkan perjalanan suatu bangsa. Dalam sistem politik, pemilihan umum bermakna sebagai sarana penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga akan terciptanya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karenanya, dalam proses demokratisasi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara yang kemudian termanifestasikan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan hak politik setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang (A. C. Marasabessy, 2121).

Dalam pemilihan umum, perilaku pemilih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan pilihan mereka terhadap kandidat tertentu. Menurut Plano dalam Budiardjo (2008), studi perilaku pemilih berfokus pada kecenderungan masyarakat dalam menentukan pilihan politik serta latar belakang yang melatarbelakangi keputusan tersebut (Simanullang, 2023). Kecenderungan ini mencerminkan arah hati dan pikiran pemilih terhadap preferensi politik tertentu, sedangkan latar belakang mencakup kondisi sosial yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Berbagai pertimbangan yang mendorong pemilih, antara lain, hubungan kekerabatan, kesamaan agama atau etnis, latar belakang pendidikan, ideologi partai, praktik politik uang, serta penilaian rasional terhadap visi, misi, dan rekam jejak para kandidat.

Studi tentang pemilihan umum menghasilkan beberapa tipe perilaku pemilih. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum serangkaian kegiatan membuat keputusan yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Jika memutuskan untuk memilih, apakah yang dipilih partai politik atau figur (kandidat). Hal ini, menunjukkan bahwa tindakan politik warga negara, memang selalu bergerak dari tidak terlibat sama sekali, terlibat secara terbatas hingga terlibat secara penuh dalam kegiatan politik. Mereka yang tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan politik dalam arti sikap masa bodoh atau apatis dapat disebabkan beberapa hal, di antaranya; sikap acuh tak acuh, tidak tertarik pada politik, kurang mengerti masalah politik, tidak yakin bahwa usaha dalam memengaruhi kebijakan publik akan berhasil dan lain sebagainya (A. C. Marasabessy, 2121). Sebagaimana dijelaskan Miriam Budiardjo, bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen (Budiardjo, 2000).

Preferensi politik merujuk pada pilihan tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut seseorang dalam merespons dinamika politik (Meilinda, 2021). Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial individu berperan penting dalam membentuk kepercayaan serta perilaku politik, termasuk preferensi yang diambil. Prinsip ini berakar pada pemahaman dasar tentang persepsi, kognisi, dan tindakan, yakni bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Melalui interaksi dan ekspektasi terhadap interaksi, individu saling memengaruhi dalam proses berpikir, menilai, dan bertindak satu sama lain dalam konteks politik.

James Rosenau menyatakan bahwa terdapat dua bentuk partisipasi politik. Pertama, para pengamat yang memerhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan di antara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum lainnya. Pada umumnya warga negara yang merupakan khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio dan pemirsa televisi) serta aktif dalam diskusi politik, seminar dan memberikan komentar melalui media massa. Kedua, adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi (lobi) dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintahan maupun di parlemen dan di luar parlemen (Budiardjo, 2000).

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam menjelaskan perilaku pemilih, (1) Pendekatan Sosiologis (tradisional), melihat bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dsb); dan pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda); jenis kelamin (pria-wanita); agama dan lain-lain dianggap memegang peranan dalam membentuk pengelompokan yang menjadi sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang. Selain itu peranan lain yang menentukan adalah keanggotaan seseorang dalam organisasi keagamaan, dan organisasi profesi. (2) Pendekatan Psikologis, ada tiga aspek yang mempengaruhi keputusan untuk memilih atau tidak memilih yaitu ikatan emosional dengan partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. (3) Pendekatan Rasional, yaitu pendekatan yang menganggap bahwa pemilih akan memilih kandidat yang mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian (Firmanzah, 2012). Penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat banyak dilakukan, namun penelitian mengenai preferensi politik pada masa pandemi yang dilakukan

dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini baru dilakukan dengan melihat tingginya angka partisipasi masyarakat dibandingkan dengan pilkada tahun sebelumnya yang pelaksanaannya bukan pada masa pandemi. Dari penelitian ini diharapkan dapat dianalisis bagaimana preferensi pemilih dalam menentukan kepala daerah.

METODE

Penelitian ini membahas mengenai “Preferensi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi *Covid-19*”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memfokuskan pada objek atau fenomena yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu model pentahelix. Penelitian ini berupaya menyajikan data dan analisis yang rinci mengenai obyek tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada wawancara mendalam, observasi langsung lokasi penelitian dan *library research* (penelitian Pustaka), yaitu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan yang berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Penelitian mengenai partisipasi politik umumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, namun dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang mewakili preferensi politik dari berbagai kalangan seperti laki-laki, perempuan, remaja sebagai pemilih pemula, orang dewasa, perwakilan partai politik, ASN, anggota KPU hingga petugas KPPS.

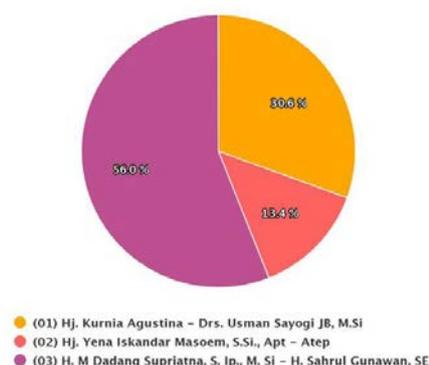
HASIL DAN PEMBAHASAN

Preferensi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung pada Masa Pandemi *Covid-19*

Pada 9 Desember 2020, Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraannya berhasil menyelenggarakan pilkada serentak di 270

daerah, yang mencakup pemilihan gubernur di 9 provinsi, bupati di 224 kabupaten, dan walikota di 37 kota (Wijayanti, 2024). Pelaksanaan ini berlangsung dalam kondisi khusus yang tidak disebabkan oleh bencana alam, melainkan oleh penyebaran virus COVID-19. Kondisi tersebut tentu memengaruhi jalannya pemilihan, sehingga terdapat perbedaan dalam penyelenggaraannya dibandingkan dengan pilkada yang dilaksanakan dalam situasi normal.

Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020 di seluruh wilayah termasuk di Kabupaten Bandung. Dalam histori pelaksanaan pilkada Kabupaten Bandung, pilkada tahun 2020 merupakan Pilkada yang sukses menaikan angka partisipasi masyarakat dan tercatat sebagai tingkat partisipasi tertinggi selama pelaksanaan pilkada yakni sebesar 72.18%. Secara keseluruhan jumlah pemilih pada Pilkada Kabupaten Bandung tahun 202 adalah 1.711.642 jiwa. Adapun detail jumlah perolehan suara oleh ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :



Sumber : KPU Kabupaten Bandung
Gambar 1. Persentasi Hasil Pilkada Kabupaten Bandung

Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa dari ketiga pasangan calon yaitu, 1) Hj. Kurnia Agustina – Drs. Usman Sayogi JB, M.Si; 2) Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si.,Apt – Atep; 3) H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si – H.

Sahrul Gunawan, SE. Pasangan nomor urut 3 memperoleh suara yang paling tinggi sekitar 56% disusul oleh pasangan nomor urut 2 dengan suara 30.6% dan terakhir pasangan nomor urut 1 dengan suara 13.4%. Dari hasil perolah suara dan tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat kita analisis bagaimana perilaku pemilih dalam pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020, melalui uraian berikut :

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis awalnya berkembang di Eropa sebelum kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut di Amerika Serikat, khususnya oleh Biro Penerapan Ilmu Sosial di Universitas Columbia (Columbia's University Bureau of Applied Social Science), yang kemudian dikenal sebagai kelompok Columbia. Kelompok ini melakukan penelitian tentang perilaku memilih pada pemilihan umum tahun 1948 dan 1952. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, seperti status sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, keanggotaan dalam organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lokasi tempat tinggal. Dalam pendekatan ini, faktor-faktor seperti agama, tingkat pendidikan, jenis kelamin, faktor geografis, budaya, serta variabel sosial lainnya menjadi determinan utama yang membentuk preferensi politik seorang pemilih.

Pendapat lain menyatakan pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. (Kavanagh, 1983)

Perilaku pemilih di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dalam menentukan atau menjatuhkan pilihannya dalam Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020 umumnya karena faktor sosiologis. Hal tersebut dikarenakan hampir semua informan

yang peneliti wawancara menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat karena jenis kelamin dan agama dalam hal ini value dari agama yang dianut oleh para pemilih bahwa pemimpin harus laki-laki bukan perempuan. Bu Ida salah satu ASN di Kecamatan Soreang mengatakan bahwa *“Saya memilih pada saat pemilu banyak pertimbangannya namun yang dijadikan sebagai landasan adalah alasan agama karena dalam agama saya pemimpin itu wajib laki-laki, sementara dari ketiga calon pasangan, dua pasangannya adalah perempuan. Selain itu juga saya melihat dari track record”*.

Hal demikian pula diutarakan oleh salah seorang warga Pak Asep *“Saya dari pertama punya hak pilih hingga saat ini ketika akan menentukan pilihan dilihat dari agama dan pendidikannya. Bagi saya pemimpin terbaik adalah laki-laki karena laki-laki berpikir rasional dan ini berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil”*

Berdasarkan kedua pernyataan oleh kedua informan tersebut, menunjukkan bahwa perilaku yang memilih karena jenis kelamin disebabkan karena *value* dari agamanya. Selain itu, memilih pemimpin laki-laki yang didasarkan juga pada pendidikan dan track record akan mempengaruhi terhadap keputusan politik yang dibuat sehingga mampu memberikan kebaikan bagi masyarakat.

Selain itu Pak Ucu ASN di Kesbangpol Kabupaten Bandung mengatakan bahwa *“saya menentukan pilihan tentu mengkaji bagaimana latar belakang calon pemimpin mulai dari pendidikannya, pekerjaannya, kekayaannya. Kenapa hal itu dilakukan menurut saya itu sangat penting agar kedepannya kita bisa mengawal roda pemerintahan dan kalau pemimpin sudah kaya kemungkinan untuk melakukan tindakan korupsi sangat kecil”*

Dari pernyataan tersebut jelas menggambarkan bahwa kualitas pemimpin kedepan ditentukan juga oleh latar belakang calon kandidat. Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini sangat menentukan kualitas kepemimpinannya, begitu pun dengan penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin juga salah satunya dipengaruhi oleh status sosial dari calon kandidat sehingga jumlah kekayaan bagi para pemilih dianggap dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan pimpinan.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Pusat Penelitian dan Survei Universitas Michigan (University of Michigan's Survey Research Centre), yang kemudian dikenal sebagai kelompok Michigan. Penelitian terkenal dari kelompok ini antara lain *The Voter's Decide* (1954) dan *The American Voter* (1960) (Meilinda, 2021). Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis, yang dianggap kurang mampu menjelaskan kecenderungan-kecenderungan dalam masyarakat secara metodologis. Salah satu kelemahan pendekatan sosiologis adalah kesulitan dalam menentukan kriteria pengelompokan masyarakat dan alasan di balik dukungan suatu kelompok terhadap partai politik tertentu. Pendekatan ini juga mengkritik dominasi kelompok masyarakat tertentu terhadap partai politik, yang tidak lagi berlaku mutlak seiring waktu. Berdasarkan pendekatan ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih, seperti keterikatan seseorang dengan partai politik, orientasi terhadap calon anggota legislatif, dan pandangan terhadap isu-isu politik tertentu.

Dalam pendekatan psikologis ini menggunakan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Pendekatan psikologis ini menjelaskan sikap seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variable yang cukup untuk menentukan dalam mempengaruhi perilaku

politik seseorang. Maka dari itu pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. Identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan. Sementara evaluasi terhadap kandidat melihat dilihat karena sejarah yang telah diukir atau masa lalu kandidat.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa figure kandidat menjadi salah satu daya Tarik bagi pemilih untuk menentukan calon pemimpinnya, hal ini karena dipengaruhi oleh faktor psikologis. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Ida *"Saya memilih calon yang saya pilih karena secara emosional kami punya kedekatan, beliau adalah saudara saya sehingga saya tau betul bagaimana kualitas beliau. Dan saya tau betul pantas atau tidaknya beliau menjadi seorang pemimpin"*

Selain itu Pak Asep menyatakan bahwa *"Untuk pemimpin yang saya pilih ini salah satunya adalah idola saya karena beliau public figure, saya sudah tau nama beliau sejak beliau muncul di tv. Ketika saya tau bahwa beliau menjadi salah satu kandidat tentu saya akan menjatuhkan pilihan kepada idola saya"* Dari kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa faktor kedekatan dan sosok idola dari pemilih lah yang akan dipilih sebagai calon kepala daerah meski hanya subjektif dari pemilih namun faktor idola dan kedekatan ini menjadi salah satu perilaku pemilih dalam pilkada kabupaten Bandung. Perilaku pemilih tersebut menunjukkan bahwa ada ikatan emosional dari pemilih terhadap kandidat sehingga berpengaruh terhadap kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya.

Namun pendapat lain dari Bu Asri warga Banjaran menyatakan bahwa *“Dalam menentukan pilihan kepada salah satu pemimpin saya terbiasa untuk melihat partai pengusungnya karena menurut saya kualitas partai pengusung ini sangat penting untuk menilai kandidat bupati”*

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa orientasi politik dan identifikasi partai politik digunakan oleh pemilih untuk menilai dan mengukur kelayakan dari calon kandidat, kualitas partai politik pengusung menjadi salah satu faktor juga yang menentukan kualitas kepemimpinan dari kandidat.

3. Pendekatan Pilihan Rasional

Teori Afan Gaffar mengenai perilaku pemilih teori dalam pendekatan teori V. O. Key. Dimana pendekatan pilihan rasional, selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Pemilih melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya, dan karena itu pemilih perlu membuat pilihan. Untuk menentukan sikap dan tindakan yang efisien pemilih harus memilih antara beberapa alternatif dan yang menentukan alternatif mana yang maksimal baginya.

Beberapa informan juga menyatakan memilih berdasarkan pilihan rasional terutama informan yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga mereka akan menilai kandidat atas keuntungan ekonomis apa yang mereka dapatkan jika kandidat tersebut terpilih. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan Ibu Susi *“saya akan memilih bupati yang menjanjikan sekolah gratis, bahan pokok murah dan kalua saat kampanye ada yang mau ngasih uang ya diterima saja karena itu juga sudah biasa terjadi.”*

Sementara salah seorang ASN di Kecamatan Soreang menyatakan bahwa *“saya akan memilih pemimpin yang memudahkan kami para ASN untuk naik jabatan tidak dipersulit, honorer dimudahkan pengangkatannya karena kasian mereka kerja bertahun-tahun hanya sebagai honorer saja”*

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemilih rasional menentukan pilihan

dan sikapnya berdasarkan alternatif-alternatif yang telah dipikirkannya terlebih hal itu adalah untuk kepentingan dirinya dan golongannya. Berdasarkan hasil wawancara juga menunjukkan adanya kepentingan dalam memilih dan menerima uang yang diberikan oleh tim sukses.

Kecenderungan Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung pada Masa Pandemi Covid-19

Pada Pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai tiga pendekatan terhadap pemilih menentukan pilihannya yang digunakan pada penelitian ini. Dari tiga pendekatan yang paling sering digunakan pemilih pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Dimana pemilih, memilih karena melihat figur dari kandidat. Melalui kampanye, masa tenang dan hari pelaksanaan pun tidak memberi dampak yang besar bagi pemilih.

Seperti yang disampaikan oleh Bu Ida *“Saya bahkan sebelum masa pilkada ini dimulai dan tau kandidat yang saya pilih ini akan nyalon, saya memang sudah pasti akan memilih beliau”*

Beberapa informan lain pun menyatakan bahwa *“saya memilih karena saya mengkaji visi misi yang disampaikan oleh calon tersebut, menurut saya visi misinya bagus. Dari situ saya mulai menjatuhkan pilihan dan tidak goyah saat ada calon lain yang menawarkan visi misi.”*

Pak Ucu menyatakan bahwa *“Karena saya memiliki kedekatan secara emosional dengan salah satu kandidat maka saya akan sepenuhnya mendukung, membantu dengan maksimal agar kandidat yang saya dukung mengantongi banyak suara melalui pendidikan politik yang saya berikan kepada masyarakat”*. Dari beberapa pernyataan diatas menunjukkan bahwa kesadaran tinggi dalam memilih tanpa melihat pemberian yang diberikan dari kandidat manapun.

Beberapa informan memiliki kesamaan pilihan dalam melihat dan menentukan figure kandidat. Hasil penelitian ini mengacu pada kesadaran sendiri untuk memilih berdasarkan figure kandidat.

Perilaku Pemilih yang Tidak Memilih

Dalam penelitian ini ada dua faktor yang menyebabkan pemilih tidak memilih, yaitu:

1) Faktor Internal

Pemilih dalam kondisi badan yang tidak sehat karena pelaksanaan pemilu di tengah pandemi covid-19. Selain itu beberapa pemilih juga mengaku ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

2) Faktor Eksternal

Pemilih tidak menggunakan hak pilih karena alasan administrative seperti data KTP hilang, tidak memiliki KTP atau bahkan belum pindah kependudukan dari daerah asal namun sudah tinggal bertahun-tahun di Kabupaten Bandung tetapi tidak mengurus izin tinggal.

SIMPULAN

Dari tiga pendekatan umum yaitu pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional. kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah *Pertama*, Pendekatan Sosiologis faktor ini yang paling mempengaruhi pada model perilaku pemilih yang memilih dari sisi sosiologis, karena pemilih cenderung menentukan pilihan berdasarkan jenis kelamin dan agama. *Kedua*, Pendekatan Psikologis. Dari sisi psikologis, pemilih memilih berdasarkan kedekatan emosional dengan kandidat juga figur yang dijadikan sosok idola. *Ketiga*, Pendekatan Pilihan Rasional dalam pendekatan ini pemilih menentukan pilihan atas dasar kepercayaannya terhadap kandidat sehingga tidak melihat untung rugi yang penting baginya kandidat yang dipilihnya menang.

DAFTAR PUSTAKA

A. C. Marasabessy, N. S. (2021). Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 8-18.

- Arifin, A. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Bahriyah, E. N. (2021). Partisipasi Masyarakat Dan Penetapan PKPU No 6/2020 Menuju Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi COVID-19. *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 21-31.
- Budiardjo, M. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hasanuddin, A. M. (2021). Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi (studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 59-66.
- Kavanagh, D. (1983). *Political Science and Political Behaviour*. London: Allen and Unwin.
- Liputan6. (2020, Desember 16). *Dikdik Ripaldi*. Retrieved from liputan6: <https://www.liputan6.com/pemilu/read/4434487/kpu-partisipasi-pemilih-pilkada-kabupaten-bandung-naik-9-persen>
- Meilinda, Y. (2021). Preferensi Politik Pemilih Milenial Dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal)*, 67-78.
- Noviani, W. (2022). Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Jurnal INTIZAR UIN Raden Fatah*, 20-32.
- Simanullang, A. A. (2023). Analisis Perilaku Memilih Masyarakat Untuk Pemilu 2024 Ditinjau Dari Perilaku Pemilih Masyarakat Dalam Pilpres 2019 (Studi Kasus Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin). *MAJALAH ILMIAH METHODODA Volume 13*, 86-93.
- Sumianty, N. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19. *INTELEKTIVA*, 56-68.
- Wijayanti, S. N. (2024). Pilkada Serentak 2020 : Evaluasi Partisipasi Pemilih Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Progresif*, 78-93.